

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penelitian ini ingin mengkaji bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan parkir dan mengurai relasi kuasa di dalamnya. Idealnya pengelolaan parkir di setiap daerah seharusnya dikelola oleh pemerintah daerah dan hasil juga akan di dapatkan oleh pemerintah daerah. wewenang pemerintah kota hal ini sesuai dengan peraturan daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 telah mengatur mengenai Restribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi pada bab 1 pasal 1 bahwa pengelolaan parkir dapat dilakukan oleh pemerintah Kota dan Dinas Perhubungan. Menariknya dalam praktik pengelolaan parkir tersebut pemerintah kota seolah-olah tidak hadir dan berperan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya petugas parkir yang tidak resmi beroperasi di wilayah tersebut.

Kota Palembang adalah Kota yang padat akan penduduk, selain dari penduduk asli juga banyak penduduk yang berdatangan ke Kota Palembang dengan tujuan yang berbeda-beda. Daya tarik Kota Palembang memang banyak diminati oleh berbagai kalangan, baik dari kalangan pedagang, pencari pekerjaan, pendidikan, wisatawan, dan lainnya. Dengan demikian seharusnya pendapatan hasil daerah akan menjadi lebih banyak melalui pajak dan restribusi. salah satu pendapatan yang dapat diharapkan oleh daerah adalah restribusi parkir, terutama bagaimana Kota Palembang yang merupakan daerah cukup banyak menarik orang-orang luar datang sehingga banyaknya kendaraan yang masuk ke Kota Palembang setiap harinya, maka banyak juga tempat parkir yang di butuhkan

karena setiap kendaraan pasti akan berhenti di suatu tempat, Dengan demikian pemerintah seharusnya berperan penting dalam pengaturan parkir di Kota Palembang.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara, lalu lintas berjalan menuju suatu tempat tujuan dan setelah mencapai tempat tersebut kendaraan membutuhkan tempat pemberhentian. Tempat parkir tersebut kemudian disebut sebagai ruang parkir. Agar sistem transportasi menjadi lebih efisien maka pada tempat-tempat yang dianggap dapat membangkitkan pergerakan perjalanan harus menyediakan fasilitas pelayanan yang memadai. Parkir merupakan aset penting bagi pemerintah daerah dengan adanya parkir dan pengelolaan yang benar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pesat bagi pemerintah daerah.<sup>1</sup>

Parkir merupakan salah satu permasalahan pokok pada Kota besar parkir menjadi bisnis yang cukup menjanjikan karena lahan di Kota terbatas, tidak jarang lahan parkir menjadi rebutan. Kondisi pelayanan parkir yang tidak baik memberikan gangguan bagi sistem lalu lintas salah satunya adalah kemacetan. Kemacetan tersebut cukup mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat. Namun masih saja banyak parkir liar menggunakan bahu jalan dalam melakukan kegiatan parkir. Selain itu Keberadaan parkir liar menjadi penyebab tidak optimalnya penerimaan pendapatan daerah karena hasil pungutan liar tersebut seharusnya masuk ke kas daerah, hal ini menjadi kesempatan bagi para juru parkir tidak resmi

---

<sup>1</sup>Andi Patunggai, "Analisis Pengelolaan Jasa Parkir di Kota Makasar", *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanudin Makasar Tahun 2016

untuk mengambil keuntungan dari hal ini. Parkir liar menjadi kendala terbesar bagi pemerintah Kota dalam mewujudkan pengelolaan restirbusi parkir yang baik.

Dalam penelitian ini, peneliti melihat bahwa jalan Pasar 16 ilir Kota Palembang merupakan salah satu tujuan wisata yang banyak diminati oleh kalangan masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari bahkan kebutuhan lainnya. Dalam hal ini Pasar 16 ilir Kota Palembang memiliki banyak lahan parkir mulai dari area jalan atmo simpang JM, pasaraya bandung, jalan tengkuruk, jalan pasar burung, lorong basah dan di area wilayah lainnya, namun di setiap lahan parkir memiliki elit lokal (preman) yang berbeda-beda atas penguasaan lahan parkir tersebut.

Pasar 16 ilir Kota Palembang merupakan salah satu tujuan wisata yang paling banyak diminati menurut tripadvisor, bahkan menepati posisi Nomor 3 dari tujuan wisata di Palembang.<sup>2</sup> Pasar 16 ilir berada di pusat Kota Palembang. Ramainya pengunjung di Pasar 16 ilir seringkali menimbulkan berbagai macam permasalahan. karena seringkali menambah kemacetan yang terjadi di Kota Palembang. Parkir yang sembarangan dan tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kota Palembang, dan bertambahnya peningkatan pedagang kaki lima yang mengakibatkan kemacetan di Kota Palembang semakin parah namun menjadi utama permasalahan kemacetan ini adalah membuat lahan parkir di sembarang tempat, bahkan di setiap tempat atau di depan ruko-ruko dijadikan lahan parkir, padahal telah disediakan lahan parkir oleh pemerintah Kota

---

<sup>2</sup> <http://www.google.co.id/amp/s/.hqeemstamps.wordpress.com/.2016/08/08/-16-ilir-palembang/amp/>. Diakses pada tanggal 31 desember jam 20.21

Palembang sehingga berdampak pada penataan parkir menjadi tidak tersusun dengan rapi.

Parkir yang tidak beraturan di Pasar 16 ilir Kota Palembang karena adanya kesalahan tata kelola oleh pemerintah, karena selama ini pemerintah membiarkan adanya parkir liar tersebut sehingga mengakibatkan hilangnya peran pemerintah dalam pengelolaan parkir. Hilangnya peran pemerintah dalam pengelolaan parkir tersebut dikarenakan ada orang-orang kuat yang berada di balik lingkup parkir tersebut sehingga pemerintah pun semakin kehilangan daya dan tidak dapat bertindak dalam proses memaksimalkan pendapatan parkir dari lahan parkir tersebut, karena ada aktor-aktor lain (non pemerintah) yang bermain dan mempertahankan kuasanya dalam area parkir tersebut.

Kemudian dalam islam praktek parkir adalah termasuk dalam ijarah yang berarti akad sewa menyewa untuk unuk mengambil suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan penganti. Penarikan tariff parkir yang dilakukan di jalan pasar 16 dengan sistem progresif ternyata masih ada sebagian masyarakat yang mengatakan hal tersebut adalah merupakan bentuk pemaksaan dalam akad yang disebabkan oleh perubahan terhadap biaya sewa pada transaksi parkir. Hal ini terdapat dalam firman Allah Swt dalam surat al-mai'dah ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اَجَلْتُمْ لَكُمْ بِهِيْمَةً  
 اَلَّا تَنْعَمَ اِلَّا مَا يُثَلَّى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجْلِى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ  
 اَللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ①

Artinya :

“hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu. Dihalakan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalakan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji sesungguhnya allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikeendakinya”

Berdasarkan ayat di atas penyimpangan yang dilakukan oleh jasa parkir untuk menghindari kewajiban menanggung segala macam kelalaian maka hendaknya juru parkir tersebut dapat menegakkan sistem pengelolaan parkir dengan baik dan tidak dengan cara memungut tarif parkir yang melebihi batas

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pola relasi kuasa yang terbangun dalam lahan parkir di jalan pasar 16 ilir Kota Palembang?
2. Bagaimana *Local Strongman* (preman parkir) mempertahankan kekuasaannya di lingkungan jalan pasar 16 Kota Palembang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana relasi kuasa dalam pengelolaan parkir dan bagaimana orang-orang kuat mempertahankan kekuasaannya di jalan pasar 16 ilir kota Palembang.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian ilmu politik islam, khususnya tentang politik dalam pengelolaan parkir di jalan pasar 16 ilir kota Palembang

## 2. Kegunaan secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan masukan bagi pemerintah Kota Palembang khususnya Dinas Perhubungan Kota Palembang mengenai pola parkir di jalan pasar 16 ilir Kota Palembang

### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka yang digunakan pada penelitian ini meliputi beberapa penelitian yang mirip dan sudah dilakukan sebelumnya, sebagai berikut:.

Agusniar Rizka Lutfiah, “Kuasa Aktor Dalam Dunia Parkir Liar” (studi kasus kuasa aktor dalam dunia parkir liar di RSUD dr Sardjito dengan menggunakan perspektif foucauldian dan gramscian) dalam jurnalnya menyimpulkan bahwasanya parkir liar tersebut terbentuk oleh karena adanya pemeran orang yang berkuasa dalam parkir tersebut dengan membentuk masyarakat parkir liar dengan senganap tantangan aturan yang sedemikian rupa agar kuasa tersebut dapat berada dimana-mana termasuk disini adalah parkir liar. Kuasa itu sendiri yang jelas adalah praktiknya. Kuasa dapat menyentuhkeberbagai kehidupan sosial dan meresap hingga pada sisi paling halus dalam kehidupan individu dan kelompok<sup>3</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Marcelino Solissa sebagai tugas akhirnya pada tentang “Fenomena Orang Kuat Lokal di Indonesia: Studi kasus tentang kemunculan KEDA dalam eksploitasi tambang emas di Gunung Botak Kabupaten Buru Provinsi Maluku”. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kegiatan elit

---

<sup>3</sup>Agusniar Rizka Lutfiah, “Kuasa Aktor dalam Dunia Parkir Liar (Studi Kasus Kuasa Aktor dalam Dunia Parkir Liar Di RSUD Dr Sardjito Dengan Menggunakan Perspektif Foucauldian dan Gramscian)”*Jurnal* Tahun 2012

lokal terlihat jelas, bagaimana peran elit lokal berhasil membangun kekuatan dengan memanfaatkan kelemahan. Negara dalam hal ini membangun jaringan dengan pihak-pihak yang terkait dalam konstitusi formal maupun non formal untuk kepentingan kelompok.

Peranan orang-orang kuat lokal tidak dapat lagi dibendung, tetapi demikian kesempatan yang sama bagi semua masyarakat untuk berkiprah di politik lokal perlu di optimalkan. Desentralisa tidak selalu mengartikulasikan kesejahteraan rakyat di daerah, alih-alih desentralisasi memberikan peluang bagi orang kuat lokal untuk menancapkan<sup>4</sup> kakinya dalam penguasaan perekonomian dan sumberdaya daya di daerah. Para orang kuat lokal ini tidak hanya menggunakan sistem oligarki untuk menguasai daerah namun orang kuat lokal juga menggunakan sistem dinasti politik untuk melanggengkan kekuasaannya di daerah dan memudahkan akses dalam mengeruk sumberdaya yang ada di daerah. Ini di buktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Malvin Perjuangan Hutabarat di Jambi. Peneliti melihat bahwa orang kuat dalam mengamankan kekuasaannya di daerah mereka membangun apa yang di sebut dengan dinasti politik.

Randy Ilyas “Pengelolaan Persaingan Elit Lokal di Koto Lamo” dalam kesimpulan skripsinya menjelaskan bahwa terdapat persaingan elit lokal di Koto Lamo. Elit lokal tersebut menggunakan kekuatan modal dalam memainkan strategi untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Pengeloan persaingan elit lokal di Koto Lama biasa dimulai dengan penyadaran kembali akan fungsi dan

---

<sup>4</sup>Solisa, Marcelino Perjuangan, “Fenomena Orang Kuat Lokal di Indonesia Studi Kasus Tentang Kemunculan Keda dalam Eksploitasi Tambang Emas di Gunung Batak Kabupaten Buru Provinsi Maluku” *Jurnal*(Vol 2, No 2, Juli 2016 )

tugas elit lokal pada konteks masyarakat kekinian dan meningkatkan interaksi dengan kaum antar kaum elit lain sehingga tercipta kembali semangat hidup bermasyarakat.<sup>5</sup>

Yulion Zalpa, dalam tesisnya menjelaskan bagaimana negara (Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat) telah menjalin kerjasama dengan bos-bos lokal (pengusaha) dalam bisnis-politik tambang batu bara, adanya kerja sama dan kepentingan antara pemerintah daerah dan pengusaha tersebut telah melahirkan relasi baru antara pengusaha lokal dengan penguasa lokal yang ditandai oleh munculnya kekuatan-kekuatan baru di tingkat lokal atau elit daerah. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila terdapat kehadiran bos lokal seperti mafia, preman dan sebagainya dalam usaha penguasaan sumberdaya ekonom<sup>6</sup>

Dona Fauziah, “Ekonomi Politik: Relasi Pemerintah Daerah Masyarakat Dalam Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuatan Singingi Tahun 2013-2015” dalam jurnal ini menyimpulkan relasi antara pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin dimana dalam hal ini diduga adanya hubungan antara penguasa dan pengusaha dalam mendapatkan keuntungan pribadi/kelompok secara finansial atas aktivitas penambangan emas secara ilegal. Penguasa dan pengusaha menjadi aktor utama dalam aktivitas penambangan emas secara ilegal dan melibatkan beberapa tokoh masyarakat yang dianggap mampu memberikan

---

<sup>5</sup>Randy Ilyas, “Pengelolaan Persaingan Elit Lokal di Koto Lamo”*Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Makasar Tahun 2014

<sup>6</sup>Yulion Zalpa, “Beruburu Rente di Tambang Emas Hitam : Relasi Kuasa Antara Pemerintah Daerah dan Pengusaha dalam Bisnis Tambang Batu Bara di Kabupaten Lahat”.*Tesis* Pascasarjana Politik dan Pemerintahan Gajah Mada Tahun 2016

kenyamanan kepada pengusaha. Meskipun banyak beberapa tokoh masyarakat mengetahui bahwa tambang ilegal tersebut tidak memiliki izin kepada bupati, dinas ESDM, anggota DPRD namun kegiatan penambangan masih terus berjalan karena ada beberapa orang kuat lokal yang berada di lingkup penambangan emas ilegal tersebut. Dampak relasi yang terjadi sangat banyak negatifnya dari pada positif. Dimana dampak PETI sangat merusak lingkungan, tantangan sosial budaya masyarakat, dan juga terhadap pemerintah daerah.<sup>7</sup>

Lilis nurjanah, “Diffused Relation (Studi Tentang Relasi Negara Dan Masyarakat dalam Resolusi Konflik Pertambangan Pasir Ilegal di Padukan Ngepring, Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, DIY” dalam skripsinya menyimpulkan untuk mengetahui relasi Negara dan masyarakat dalam proses resolusi konflik, dan untuk mengetahui aktor-aktor yang terlibat serta mengetahui kepentingan antar aktor. Tidak heran lagi apabila di balik lingkup pertambangan pasir ilegal tersebut ada beberapa orang kuat lokal yang memainkan perannya untuk kepentingan pribadi/kelompok sehingga, Negara tidak memiliki daya untuk beroperasi dalam tambang ilegal tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Fauziah Dona , “Ekonomi Politik Relasi Pemerintah Daerah Masyarakat dalam Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi” Tahun 2013-2015 *Jurnal* (Vol 4, No 2, Februari 2017)

<sup>8</sup>Nurjanah Lilis, “*Diffused Relation*(Studi Tentang Relasi Negara dan Masyarakat dalam Resolusi Konflik Pertambangan Pasir Ilegal di Padukan Ngepring, Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, DIY” *Skripsi* fakultas Ilmu Pemerintahan UGM Yogyakarta Tahun 2016.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Orang Kuat Lokal**

Untuk menganalisa fenomena orang kuat lokal peneliti meminjam teori Joel Migdal. Teori ini dianggap peneliti mampu menjelaskan dan mengurai permasalahan parkir yang terjadi di Jalan pasar 16 ilir Kota Palembang. Orang kuat lokal ini menepati wilayah tertentu yang strategis untuk menjalankan kekuasaannya. Desentralisasi memberikan peluang untuk berkembangnya orang kuat lokal di daerah, hal ini sama dengan fenomena yang terjadi di Jalan Pasar 16 ilir Kota Palembang dimana orang kuat memanfaatkan desentralisasi untuk melanggengkan kekuasaannya dalam memonopoli kontrol masyarakat di daerah. Berkuasanya orang kuat lokal adalah hasil dari segitiga penyesuaian antara “politisi”, “birokrat lokal” dan “pengusaha” yang membangun apa yang disebut oleh Joel Migdal sebagai jejaring pertukaran sosial ekonomi dan politik.

Desentralisasi di Indonesia tidak hanya melahirkan kewenangan dan otoritas baru pada tataran pemerintah daerah, tetapi juga memengaruhi pola kontrol sosial masyarakat di daerah tercemin dari penguatan jaringan oleh pemimpin daerah yang kemudian dikenal sebagai orang kuat lokal atau *Local Strongman*. Figure tersebut semakin tumbuh subur di dalam masyarakat karena berhasil menguasai struktur di dalam masyarakat baik secara agama, budaya maupun sosial.

Lebih jauh, Joel Migdal menjelaskan tentang kemunculan orang kuat lokal (*Local Strongman*) yang berhasil melakukan kontrol sosial dalam konteks ini

mereka berhasil menempatkan diri atau menaruh anggota keluarga mereka pada sejumlah jabatan penting demi menjamin alokasi sumber-sumber daya berjalan sesuai dengan aturan mereka sendiri ketimbang menurut aturan-aturan yang dikeluarkan dalam retorika resmi, pernyataan kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang di buat di kota/kabupaten atau yang di tingkat bawah oleh pelaksanaan yang kuat<sup>9</sup>

Kekuatan *Local Strongman* tidak hanya sebatas penguasaan masyarakat di bidang agama, social, budaya tetapi juga di bidang ekonomi sehingga *Local Strongman* memiliki legitimasi untuk memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat karena kehadirnya dapat memenuhi kebutuhan pokok dan tuntutan para pemilih atas jasa yang diberikan sehingga dari hal tersebut *Local Strongman* dapat menciptakan keterkendalian di dalam masyarakat.

Joel Migdal mendefinisikan *Local Strongman* atau orang kuat lokal adalah sebagai pemimpin nonformal Negara seperti tuan tanah, lengkuak, pengusaha, kepala suku, panglima perang, bos, petani kaya, pemimpin klan dan lain-lain yang membangun organisasi sosialnya yang berbentuk jejaringan dalam rangka menjalankan kontrol sosial atas masyarakat untuk menguasai keseluruhan populasi yang mendiami wilayah tertentu.<sup>10</sup>

Dalam sebuah arena politik *Local Strongman* bersama birokrat dari tingkat lokal yang menjalankan kebijakan pemerintah dan politisi lokal yang terdiri dari politik dan pemimpin formal di tingkat lokal, membentuk segitiga akomodasi

---

<sup>9</sup> Jhon Haris, Dkk, *Politisasi Demokrasi Politik Lokal Baru*, Terjemahan dalam Bahasa Indonesia, Demos, Jakarta. 2005. Hal 72

<sup>10</sup> Melvin, "Fenomena Orang Kuat Lokal di Indonesia Era Desentralisasi", *E-jurnal.UI.Ac.Id*

yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Mereka membangun apa yang di sebutkan Joel Migdal sebagai jejaringan pertukaran social ekonomi dan politik.

*Local Strongman* melakukan tawar menawar dengan birokrat dan politisi yang menghasilkan kompromi. *Local Strongman* menawarkan stabilitas lokal yang ditukar dengan jaminan tidak mengganggu kekuasaan mereka yang telah berlangsung. Bahkan mereka menawarkan untuk dapat terlibat langsung memengaruhi keputusan penting mengenai alokasi sumber daya dan aplikasi aturan-aturan kebijakan Negara ataupun kebijakan daerah dengan cara menempatkan anggota keluarga mereka pada sejumlah jabatan penting demi menjamin alokasi sumber daya berjalan dengan aturan mereka sendiri<sup>11</sup>

Untuk memperkuat pendapatannya, Migdal kemudian mengemukakan tiga argument yang saling berhubungan mengenai fenomena keberhasilan *Local Strongman* mengendalikan sumber daya politik dan ekonomi daerah tersebut. Pertama, *Local Strongman* telah mengembangkan “*weblike societies*” (masyarakat berjejaring) melalui organisasi otonom yang mereka miliki dan kendalikan dalam kondisi masyarakat yang terfragmentasi secara sosial. Kedua, *Local Strongman* melakukan kontrol sosial melalui distribusi komponen yang disebut “*Strategies Of Survival*” (strategi untuk bertahan hidup) dari masyarakat lokal. Pola ini kemudian menghasilkan model personalism, clientalism, dan relasi patron-client yang sangat kuat, dimana mereka hadir menjadi semacam “ penolong” masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup mereka. Ketiga, *Local Strongman* menguasai state agency dan sumber daya, sehingga agenda kebijakan merupakan

---

<sup>11</sup>Supriyanto, “Figuritas Local Strongman RKH. FUAD AMIN Terhadap Perolehan Kursi DPRD (Studi pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Bangkalan)”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Muhammadiyah Malang. 2016

hasil kompromi dengan kepentingan *Local Strongman*. *Local Strongman* melakukan kontrol dan limitasi atas otonomi dan kapasitas negara yang tidak berdaya di hadapan pengaruh mereka. Dengan cara demikian mereka berhasil melemahkan negara dalam proses pencapaian tujuan perubahan sosial.<sup>12</sup>

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kota Palembang provinsi Sumatera Selatan. Kota Palembang Kota yang paling dikenal dengan salah satu Kota terbesar di Sumatera yang berkembang begitu pesat. Dengan pesatnya perkembangannya maka dapat menghasilkan keuntungan salah satunya redistribusi parkir. Sedangkan lokasi penelitian ini di Jalan Pasar 16 Ilir Kota Palembang.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah menggunakan metodologi kualitatif. Metode penelitian ini menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian dengan pendekatan ini adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, selain itu semua yang dikumpulkan menjadi kunci terhadap yang diteliti.

### **3. Sumber Data**

Sumber Data Dalam penelitian ini, data yang akan di peroleh dari dua sumber, yaitu:

---

<sup>12</sup>Agus Sutisna, "Local Strongman, Local Bossism, dan Fenomena Uncivlitas: Kasus Jawara di Banten" *Jurnal* Tahun 2016

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari informan, dengan memakai teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara), serta melakukan observasi (pengamatan langsung terhadap penelitian).

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip resmi, serta literature lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian sesuai dengan objek penelitian guna mendapatkan data sekunder yang akan digunakan dalam menganalisa permasalahan mengenai konsep, teori-teori, kebijakan-kebijakan dan pelaksanaannya yang berhubungan dengan relasi kuasa dalam pengelolaan parkir di jalan pasar 16 ilir kota Palembang

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang kompleks suatu proses yang terusun dari berbagai proses biologi dan psikologi.<sup>13</sup> Selain itu Observasi juga merupakan kegiatan yang dilakukan secara langsung terhadap pegawai dalam melaksanakan tugasnya di lahan parkir jalan pasar 16 ilir Kota Palembang.

---

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* Bandung Alfabeta, 2014 Hlm 241

- b. Interview atau wawancara, yaitu komunikasi secara lisan dengan maksud memperoleh informan tertentu. Metode ini sering disebut *face to face* relation, dengan tujuan agar memperoleh informasi langsung dengan cara bertatap muka atau bertanya langsung ke informan. Wawancara harus dilakukan dengan efektif artinya dalam waktu sesingkat-singkatnya dapat diperoleh data yang sebanyak-banyaknya. Bahasnya harus jelas dan terarah. Begitu juga dengan susunannya harus tetap rileks agar data diperoleh adalah data yang objektif dan dapat dipercaya.<sup>14</sup> Metode ini ditujukan untuk memahami gejala masalah yang diteliti dengan menekankan pada permasalahan pokok mengenai proses relasi kuasa dalam pengelolaan di jalan pasar 16 ilir Kota Palembang. Peneliti akan mewawancarai narasumber yaitu Dishub, Preman, Tukang Parkir.
- c. Dokumentasi. Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh lembaga/perorangan atas nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga. Dokumen yang akan dijadikan sebagai sumber referensi dapat berupa hasil rapat, laporan pertanggungjawaban, surat, dan catatan harian. Adapun perda yang mengatur, Nomor 16 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi.

---

<sup>14</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.  
Hlm 197

d. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting sekali dalam metode ilmiah untuk mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian dan untuk mengetahui sampai ke mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang, sampai ke mana terdapat kesimpulan dan degeneralisasi yang pernah dibuat. Cara yang dilakukan dengan mencari data-data pendukung (data sekunder) pada berbagai literatur baik berupa buku-buku, dokumen-dokumen, makalah-makalah hasil penelitian serta bahan-bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian

## **5. Analisa Data**

Menganalisa data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Analisa data adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisa data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisa berdasarkan data yang di peroleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.<sup>15</sup> Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data dilapangan model Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus secara tuntas. Langkah-langkah analisa data model Miler and Huberman yaitu :

---

<sup>15</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* Bandung Alfabeta, 2014 Hlm 244

a. *Data Reduction* (reduksi data)

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. *Data Display* (penyajian data)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian hubungan antar kategori flowchart dan sejenisnya yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami<sup>16</sup>

c. *Conclusion Drawing/Verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi)

Langkah yang ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kelengkapan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya

---

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* Bandung Alfabeta, 2014 Hlm 244-247

belum pernah ada. Temuan berupa deskriptif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya. Masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dapat berupa hubungan atau interaktif, hipotesis, atau teori.<sup>17</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini membahas tentang relasi kuasa dalam pengelolaan parkir di Jalan pasar 16 ilir Kota Palembang.

## **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian.

## **BAB II :Gambaran Umum Objek Penelitian**

Dalam bab ini menceritakan sejarah Kota Palembang, sejarah Pasar 16 ilir kota Palembang dan menggambarkan keadaan pasar 16 ilir kota Palembang, serta keadaan parkir di pasar 16 ilir Kota Palembang

## **BAB III : Temuan Dan Analisis Data**

Dalam bab ini menjelaskan bagaimana relasi kuasa dalam pengelolaan parkir di jalan pasar 16 ilir Kota Palembang dan bagaimana cara *Local Strongman* (preman parkir) mempertahankan kekuasaan wilayah parkir tersebut

---

<sup>17</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* Bandung Alfabeta, 2014 Hlm 245

#### **Bab IV : Penutup**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian, bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari hasil selama penelitian yang dilakukan oleh penelitian tersebut. Dan juga saran yang berisi tentang terjawabnya apa yang telah dilihat peneliti yang dilakukan baik yang bermanfaat bagi penulis atau umum